



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI I DPR RI
DALAM RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2011 – 2012
KE PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TANGGAL 7 – 9 NOVEMBER 2011**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2011**

BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

Setiap Reses Masa Persidangan, Komisi-komisi DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke daerah-daerah. Hal ini sesuai dengan Pasal 54 ayat 3 huruf (f) Tata Tertib DPR RI yang menyatakan bahwa “mengadakan kunjungan kerja dalam Masa Reses atau apabila dipandang perlu, dalam Masa Sidang dengan persetujuan Pimpinan DPR RI yang hasilnya dilaporkan dalam Rapat Komisi untuk ditentukan tindak lanjutnya”. Berdasarkan hal tersebut, maka pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011 – 2012, Komisi I DPR RI telah membentuk Tim Kunjungan Kerja, yaitu Kunjungan Kerja ke Provinsi Bangka Belitung. Dalam laporan ini akan disampaikan mengenai Laporan Tim Kunjungan Kerja Ke Bangka Belitung.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kunjungan Kerja Komisi I DPR ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi dan wewenang DPR RI yaitu fungsi legislasi (*legislation*), fungsi anggaran (*budgeting*) dan fungsi pengawasan (*controlling*). Disamping itu untuk mengetahui secara langsung situasi dan kondisi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) saat ini yang memiliki relevansi dengan permasalahan Pertahanan, Intelijen, Luar negeri dan Komunikasi dan Informasi.

Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai perkembangan situasi dan kondisi mitra kerja Komisi I DPR RI di lapangan serta permasalahan-permasalahan yang terjadi baik yang menyangkut sarana dan prasarana maupun kualitas sumber daya manusianya. Data dan informasi tersebut digunakan sebagai bahan masukan dan kajian Komisi I DPR RI dalam pembahasan rapat-rapat kerja dengan pemerintah dan instansi terkait sebagai mitra kerja Komisi I DPR RI dalam masa persidangan berikutnya.

C. WAKTU DAN KOMPOSISI TIM KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Propinsi Bangka Belitung dilaksanakan dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 9 November 2011, dengan komposisi keanggotaan Tim yang terdiri dari 13 (tiga belas) orang Anggota Komisi I DPR RI dibantu oleh 2 (dua) orang Sekretariat Komisi I DPR-RI, 1 (satu) orang Staf Ahli Komisi I DPR RI dan 1 (satu) orang Bagian Pemberitaan Setjen DPR RI. Tim juga didampingi oleh beberapa pejabat dari kementerian/lembaga mitra yang berfungsi sebagai penghubung dan pendamping.

Adapun daftar nama Tim Kunker Komisi I DPR RI ke Propinsi Bangka Belitung secara lengkap adalah sebagai berikut:

NO.	N A M A	FRAKSI & NO. ANGG.	KETERANGAN
1	H. HAYONO ISMAN, S.IP	WAKIL KETUA KOMISI I	
2	EDHIE BASKORO YUDHOYONO, B.COM, M.SC	F.PD / A - 519	
3	DR. HJ. R. ADJENG RATNA SUMINAR, S.H., MH	F.PD / A - 466	
4	VENNA MELINDA, SE	F.PD / A - 518	
5	MIRWAN AMIR	F.PD / A - 416	
6	MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.IP, MM	F.PD / A - 488	
7	DR. NURHAYATI ALI ASSEGAF, M.SI	F.PD / A - 515	
8	EVITA NURSANTY, M.SC	F.PDI-P/ A - 357	
9	THEODORUS J. KOEKERITS	F.PDI-P / A - 358	
10	HELMY FAUZI	F.PDI-P / A - 343	
11	DR. H. MAIYASYAK JOHAN, S.H., MH	F.PPP / A - 283	
12	RACHEL MARYAM SAYIDINA	F.GRD / A - 26	
13	DR. SUSANINGTYAS N. H. KERTOPATI M.SI	F.HANURA / A - 9	
	TATANG SETIAWAN		SET. KOMISI I DPR RI
	AGUNG PERMATA		SET. KOMISI I DPR RI
	MOSES CAESAR ASSA		TENAGA AHLI KOMISI I
	AGUNG SULISTIONO		BAG. PEMBERITAAN DPR

BAB II PELAKSANAAN KUNJUNGAN

Dari hasil kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Bangka Belitung, beberapa hal yang dapat dilaporkan Tim mengenai keadaan Provinsi Bangka Belitung, antara lain :

A. GAMBARAN UMUM KONDISI BABEL

1. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tanggal 21 November 2000 yang memisahkan diri dari Provinsi Sumatera Selatan. Dalam perjalanannya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 maka dilakukanlah pemekaran menjadi tujuh wilkayah, yang terdiri dari 2 Kabupaten dan 1 Kota dengan ibukota Provinsi Pangkal Pinang.
2. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki luas wilayah mencapai 81.724,14 Km² , yang terdiri dari :
 - a. Luas Daratan adalah 16.424,14 Km² atau 20,10%
 - b. Luas Wilayah Laut adalah 65.301,00 Km² atau 79,90 %.Mencakup sekitar 470 pulau, dengan jumlah penduduk menurut Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 sebanyak 1.223.048 jiwa. Laju pertumbuhan penduduknya 3,15 %.
3. Wilayah lautan dari Provinsi Babel merupakan bagian dari Alur Laut Kawasan Indonesia I (ALKI I) sehingga banyak dilintasi kapal-kapal pelayaran internasional yang masuk dari Selat Malak dan Laut Cina Selatan. Posisi geografisnya terletak pada 104° 50' - 109° 30' Bujur Timur dan 0° 50' - 4° 10' Lintang Selatan dengan batas wilayah:
 - a. Sebelah Barat dengan Selat Bangka
 - b. Sebelah Timur dengan Selat Karimata
 - c. Sebelah Utara dengan Laut Natuna
 - d. Sebelah Selatan dengan Laut Jawa
4. Agama yang berkembang dan banyak dianut masyarakat Bangka Belitung atas dasar prosentase jumlah pengikutnya adalah sebagai berikut:
 - a. Islam berjumlah 81,83%
 - b. Budha berjumlah 8,71%
 - c. Kong Hu Cu berjumlah 5,11%
 - d. Kristen Protestan berjumlah 2,44%
 - e. Kristen katolik berjumlah 1,79%
 - f. Hindu Berjumlah 0,13%

B. KUNJUNGAN TERKAIT BIDANG TUGAS KOMISI I DPR RI

Dari hasil kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Bangka Belitung, terdapat beberapa bidang permasalahan yang dihadapi Provinsi Bangka Belitung antara lain, yakni :

1. BIDANG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANGKA BELITUNG

Dari hasil pertemuan dan paparan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung beserta Jajaran Muspida Tingkat Provinsi, Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyimpulkan beberapa permasalahan hal-hal:

- a. Kegiatan Tambang Inkovensional (TI) menjadi suatu permasalahan bagi Pemerintah Daerah. Awalnya kegiatan tersebut dilakukan masyarakat hanya untuk memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat daerah. Namun dalam perjalanannya “ditunggangi” oleh kepentingan bisnis. Maraknya aktivitas TI ini berpotensi merusak kelestarian biota laut dan mengancam wisata bahari. Namun tindakan penertiban juga berpotensi membuka celah konflik sosial.
- b. Rencana pembangunan PLTN sebagai solusi keterbatasan energi listrik di Babel yaitu Permis, Simpang Rimba Basel dan Teluk Ingris, Mentok Babar dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik Babel mendapat resistensi sejumlah elemen masyarakat.

2. BIDANG PERTAHANAN

Di bidang Pertahanan, beberapa permasalahan utama dihadapi oleh Korem 045/Garuda Jaya yakni, sebagai berikut:

a. KOREM 045 GARUDA JAYA

- 1) Komando Resor Militer 045/Garuda Jaya (Korem 045/Gaya) dibentuk berdasarkan Perkasad Nomor Perkasad 19/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang pembentukan Korem 045/Gaya di jajaran Kodam II/Sriwijaya yang meliputi wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan Ibukota Provinsi Pangkalpinang. Namun dislokasi Makorem 045/Gaya saat ini berada di Kabupaten Bangka Tengah. Hal ini sangat menghambat koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Korem 045/Gaya hanya memiliki 2 Kodim yaitu Kodim 0413/Bangka (Membawahi 15 Koramil yang tersebar di Pulau Bangka) dan Kodim 0414/Belitung (Membawahi 6 Koramil yang tersebar di Pulau Belitung) serta Tim Intel Korem. Kodim 0413/Bangka meliputi wilayah teritorial Pulau Bangka yaitu

Kotamadya Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka barat, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka selatan. Adapun Kodim 0414/Belitung meliputi wilayah territorial Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Begitu luasnya wilayah territorial Korem 045/Gaya dan minimnya jumlah Kodim yang dimiliki menyulitkan pembinaan dan pengendalian wilayah.

- 3) Secara umum kondisi Satuan Korem 045/Gaya ditinjau dari bidang organisasi dan personil, alutsista, alat komunikasi khusus, alat materil khusus, serta logistic yang dimiliki masih kurang. Hal ini disebabkan karena kurangnya dukungan anggaran pertahanan dari Komando Atas.
- 4) Terkait dengan sarana komunikasi, Makorem belum ter-cover oleh jaringan komunikasi telepon, karena ketidaksanggupan PT. Telkom dalam penyediaan kabel. Akibatnya, Makorem sering mengalami keterlambatan dalam mengakses informasi.

b. LANAL BANGKA BELITUNG

- 1) Perbandingan luas perairan dan daratan di Provinsi Bangka Belitung adalah 80% wilayah laut dan 20% daratan, dengan jumlah 250 pulau dan panjang garis pantai 2180 km². Dengan karakteristik wilayah kepulauan ini, LANAL Bangka Belitung menghadapi masalah keamanan laut seperti pencurian ikan, perompakan, dan pencurian harta karun.
- 2) Sebagai komponen pertahanan matra laut strategis, LANAL Bangka Belitung merupakan LANAL Tipe B, namun belum didukung oleh personil, alutsista, serta logistik yang memadai.
- 3) Kondisi infrastruktur di Provinsi Bangka Belitung juga tidak mendukung pelaksanaan tugas LANAL Bangka Belitung, antara lain dengan ketiadaan fasilitas pelabuhan, ketiadaan Talud untuk menahan abrasi air laut, dan belum memadainya pasokan listrik.

c. LANUD TANJUNGPANDAN

- 1) Dislokasi LANUD Tanjung Pandan berada di Kota Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung atau lebih tepatnya di Pulau Belitung. Namun tanggung jawab pengamanan wilayah udara LANUD Tanjung Pandan meliputi seluruh wilayah udara di Provinsi Bangka Belitung. Sementara untuk meng-cover perwakilan di Kota Pangkal Pinang dan perwakilan di Kabupaten Beitung Timur masih terkendala Alat Komunikasi (Alkom).
- 2) Luas pangkalan LANUD Tanjung Pandan tidak mencukupi untuk melaksanakan dukungan kegiatan operasi udara. LANUD Tanjung Pandan berencana membangun pangkalan udara induk, dan saat ini telah tersedia lahan seluas 340

hektar untuk pembangunan pangkalan tersebut. Namun saat ini masih terkendala alih status lahan di pemerintah pusat.

- 3) LANUD Tanjung Pandan merupakan LANUD penyangga ibukota negara. Namun belum memiliki peralatan radar yang dibutuhkan dalam mendeteksi ancaman terhadap kedaulatan wilayah udara nasional.

C. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

1. PT. Telkom Indonesia

- a. PT. Telkom menyatakan kesiapannya dalam pengembangan ICT di Provinsi Bangka Belitung. Hal tersebut dibuktikan penyediaan *Lines In Service* (LIS) dan jaringan Alpro antara lain telepon, Speedy, Flexi, dan Telkomsel. Kendati demikian, layanan PT. Telkom tersebut dianggap belum maksimal, dikarenakan kekurangan suplai energi listrik.
- b. PT. Telkom juga terkendala dalam hal kemudahan pemberian izin dan pembebasan lahan untuk memperlancar pembangunan infrastruktur di daerah.

2. PT. POS

- a. PT. POS telah membuka layanan dengan mendirikan 118 outlet, yang menjangkau 7 kabupaten/kota di Provinsi Babel.
- b. Meski layanan outlet PT. POS di Provinsi Babel telah tersebar luas, namun proporsionalitas antara biaya operasi dengan pendapatan tidak sebanding. Hal ini disebabkan PT. POS terhambat dengan skema PSO (*Public Service Obligation*) yang justru sering dimanfaatkan oleh jasa layanan kirim swasta, karena begitu murah biaya kirim yang dikenakan PT. POS.

3. LPP RRI Sungailiat

- a. LPP RRI Sungailiat telah sebagai media berjaringan yang berperan dalam membangun karakter bangsa dengan kearifan lokal. Saat ini LPP RRI Sungailiat telah memiliki 6 frekwensi, yang menjangkau sejumlah kabupaten/kota. Namun, terdapat sekitar 30 persen *blankspot area* yang tidak terjangkau.
- b. Selain kendala *coverage*, RRI Sungailiat juga terkendala sarana prasarana, khususnya kantor untuk siaran.

4. Loka Monitor Pangkal Pinang

- a. Pengguna frekuensi radio berizin di Provinsi Babel berjumlah 6.232 izin frekuensi. Sementara pegawai Loka Monitor Pangkal Pinang hanya didukung oleh 18 orang pegawai. Tingkat kepadatan pengguna frekuensi yang tidak sebanding dengan jumlah pegawai sangat menghambat kerja-kerja pengawasan.
- b. Dengan kondisi geografis kepulauan, Loka Monitor Pangkal Pinang tidak didukung oleh perangkat monitoring stasiun yang memiliki fleksibilitas. Hal ini sangat menyulitkan dalam pengendalian pengguna frekuensi.

5. KPID

KPID Provinsi Bangka Belitung baru terbentuk pada tanggal 2 Agustus 2011 berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 188.44/598/KOMINFO/2011. Anggotanya kini berjumlah 7 orang. Mengingat pembentukannya relative masih baru, KPID belum maksimal dalam menjalankan kewenangannya.

BAB III REKOMENDASI DAN PENUTUP

A. REKOMENDASI

Dari hasil laporan kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Bangka Belitung, Tim menyampaikan beberapa saran rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut :

1. BIDANG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANGKA BELITUNG

- a. Kegiatan Tambang Inkovensional (TI) dapat menimbulkan degradasi lingkungan dan penghentian terhadap kegiatan tersebut bisa berdampak pada sosial-ekonomi masyarakat Babel. Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu mendorong upaya pengembangan sumber ekonomi selain pertambangan.
- b. Mengingat rencana pembangunan PLTN mendapat resistensi sejumlah elemen masyarakat, perlu dilakukan pendekatan secara persuasif terhadap elemen-elemen masyarakat yang resisten terhadap kebijakan pemerintah.

2. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- a. Untuk mengoptimalkan layanan PT. Telkom dukungan ketersediaan suplai energi listrik yang cukup dari PLN, serta kemudahan pemberian izin dan pembebasan lahan dari Pemerintah Daerah.
- b. Mengingat kinerja keuangan PT. POS terhambat oleh skema PSO (*Public Service Obligation*), disarankan agar PSO tersebut dicabut.
- c. Perlu *coverage* RRI Sungailiat di 30% *blank spot area*, serta ketersediaan perangkat monitoring stasiun yang memiliki fleksibilitas bagi Loka Monitor Pangkal Pinang

B. PENUTUP

Demikian laporan Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Bangka Belitung dalam Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011 – 2012. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi Komisi I DPR RI untuk mengambil keputusan lebih lanjut terkait permasalahan dibidang Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri dan Komunikasi dan Informasi.

Jakarta, 9 November 2011

TIM KUNKER KOMISI I DPR RI KE
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KETUA,

H. HAYONO ISMAN, S.IP.
A-450